

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 <u>9</u> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 52		TAHUN 2006

Derita Lumpur Tiada Akhir

Lumpur Lapindo kemungkinan baru berakhir tiga bulan lagi. Para pengungsi kelabakan mencari nafkah.

SEKELOMPOK lelaki berbaju loreng membuka pagi dengan ritual tak lazim. Mereka menggeruduk jalan tol Gempol-Surabaya. Puluh-an orang berotot kekar ala Rambo itu datang membawa serta dua mobil pengeruk. Ada musuh yang harus dijinkan para tentara pagi itu: lumpur!

Hari itu bos besar Batalion Zeni Tempur V Malang memerintahkan para lelaki perkasanya untuk melawan teror lumpur panas yang tersembur dari sumur PT Lapindo Brantas Incorporated. Para serdadu itu punya tugas khusus, yakni membangun jembatan di atas lumpur dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Maklumlah, sudah dua pekan jalan tol itu ditutup gara-gara lumpur Lapindo. Tol tutup, ekonomi Surabaya dan Sidoarjo juga seret. Ekspor terganggu, distribusi barang dari pabrik juga tersendat. Jasa Marga, pengelola jalan tol, memperkirakan kerugian akibat tutupnya jalan tol itu mencapai Rp 1 miliar sehari. Itulah sebabnya lumpur di tol jadi obyek yang harus dipe-rangi Batalion Zeni Tempur V Malang.

Untuk membuka isolasi di jalan tol, itu, pekan lalu sepasukan tentara itu sudah memboyong ribuan kubik batu dan pasir. Mereka bersama Bina Marga, lembaga di bawah Departemen Pekerjaan Umum, akan membangun dua jembatan bailey yang terpisah. Satu untuk arah Gempol-Surabaya, satu lagi untuk arah sebaliknya.

Tenggat mereka pendek. "Untuk jalur Surabaya-Gempol dalam waktu enam hari kami akan buka kembali," kata Bachriansyah, Kepala Jasa Marga cabang tol tersebut, pekan lalu. Untuk jalur sebaliknya, mereka menarget-

kan jembatan rampung dalam 21 hari.

Sejak sumur Lapindo memuntahkan lumpur panas dari tangannya pada 29 Mei, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, jadi daerah yang sekarat. Empat desa terendam. Petani tak bisa ke sawah. Buruh pabrik terpaksa dirumahkan, juga para penarik becak harus "cuti". Ekonomi empat desa itu lumpuh. Warga menjerit.

Tengoklah jalan menuju daerah Siring Timur, Kelurahan Siring. Jalan itu kini dijaga belasan pria. Mereka mengutip Rp 1.000 dari setiap "turis dadakan" yang ingin melihat semburan lumpur panas di sumur Banjar Panji-1, Kecamatan Porong. "Kami terpaksa meminta ongkos demi menyambung hidup," kata Suratman, warga Kelurahan Siring.

Sejak 5 Juni lalu buruh PT Victory Rotanindo itu memang menganggur. Itu semua gara-gara lumpur yang membekukan usaha pabrik mebel itu. Suratman kini tak mendapat honor, juga uang lembur dan bonus. Semuanya mampet ka-

rena pabriknya juga berhenti beroperasi. Beberapa waktu lalu Lapindo pernah berjanji akan memberikan ganti rugi berupa uang Rp 650 ribu kepada setiap karyawan yang pabriknya tutup, tapi sampai kini tak jelas kabarnya.

Alhasil, pria beranak tiga ini bekerja serabutan agar dapurnya tetap mengepul. Menurut dia, uang Rp 650 ribu yang disetarakan dengan upah minimum regional Sidoarjo kelewat kecil. "Jika saya masih bekerja, ada tambahan uang lembur dan bonus," ujarnya.

Semua seret karena lumpur. Itulah sebabnya kini berbagai instansi berlomba mengusir dan menyumbat lumpur. "Pasukan" Lapindo, misalnya, sudah

Kerugian dalam Angka

5.000 sampai 50 ribu m³/hari volume semburan lumpur. Diperkirakan kebocoran tertutup dalam tiga bulan.

127 hektare sawah tergenang lumpur. Ganti rugi berupa uang sewa selama dua tahun sebesar Rp 10,8 juta. Setelah itu lahan sawah masih teracuni logam berat.

Rp 1 miliar per hari kerugian jalan tol sejak ditutup 23 Juni lalu. Rencananya tiga pekan lagi bisa dibuka penuh.

14 pabrik tutup, sekitar 1.112 orang dirumahkan.

dua pekan ini puyeng mencari titik kebocoran. Mereka sudah mengerahkan *snubbing unit*, alat pelacak kebocoran. Perusahaan milik Grup Bakrie itu juga memasukkan ultrasonografi atau alat untuk mendeteksi bunyi apakah ada aliran lain di sekitar sumur. Hasilnya masih nihil.

"Mohon dimaklumi oleh masyarakat, proses ini lama karena memiliki tingkat kerumitan tinggi," kata General Manajer PT Lapindo, Imam P. Agustino. Saat ini, Lapindo juga telah melakukan pengeboran miring yang berjarak 500 meter dari pusat semburan. Mereka juga menyewa Century Resources, perusahaan Australia yang pernah sukses mengatasi kasus serupa di Bangladesh.

Soal kebocoran ini, pemerintah telah menetapkan garis mati buat Lapindo. "Akhir Juli harus sudah diketahui apa penyebab semburan Lapindo," begitu kata Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Kardaya Warnika. Soal sanksi untuk Lapindo, menurut Kardaya, perusahaan itu akan diganjar bila bekerja tak sejalan dengan prosedur.

Rudi Rubiandini, ketua tim investigasi yang dibentuk Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan, Lapindo kini sedang menjalankan skenario pertama dari tiga skenario yang dirancang. Tiga skenario tersebut dijalankan berdasarkan dua kemungkinan: pertama mata bor sudah terjatuh ke dalam lubang sumur sedalam 9.000 kaki (2,3 kilometer). Skenario kedua, mata bor masih terjepit lubang sumur di kedalaman 2.980 kaki (894 meter).

Skenario pertama yang sedang dilakukan Lapindo adalah memasukkan *snubbing unit* dan selanjutnya mengebor lapisan semen yang saat ini menjadi penghalang. Setelah itu semen dan lumpur disuntikkan ke lubang ini. Namun, jika mata bor tidak jatuh, skenario kedua harus dijalankan. Mereka akan mengebor melalui sumur utama lalu membelok menuju bagian di bawah mata bor. Semen dialirkan melalui jalan samping ini. Bila itu tak mungkin dilakukan, maka ditempuh skenario ketiga, pengeboran miring dari samping. Imam memperkirakan proses ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.

Itu artinya, tiga bulan yang penuh derita bagi warga Porong. Lumpur tetap menyembur. Dan berdasarkan hitungan, semburan selama tiga bulan itu tak akan cukup ditampung di waduk-waduk yang disiapkan. Alhasil, luberan lumpur akan terus meluas. Suratman dan ribuan pengungsi yang lain tetap nelangsa.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 <u>9</u> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 52		TAHUN 2006

Padi-padi dalam Bekapan Racun

PUCUK tanaman padi itu masih hijau. Tingginya juga tak sampai selutut orang dewasa. Namun, tanaman berumur satu bulan itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. "Kalau tidak segera dicabut, akan tenggelam oleh lumpur," kata Kunari, pemilik sawah seluas 15 meter persegi di Desa Renokenongo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Selasa siang pekan lalu, pria beranak lima ini selesai mencabuti padinya dan meletakkannya di tepi jalan tol Surabaya-Gempol. Kunari berencana menanam kembali padi tersebut ke lahan sawahnya yang lain, yang letaknya jauh dari pusat semburan lumpur panas.

Petani itu tak mau gigit jari gara-gara lumpur yang disebarkan PT Lapindo Brantas sejak akhir Mei lalu. Dia sudah keluar uang Rp 700 ribu untuk membeli bibit, pupuk, dan merawat padi yang masih bayi itu.

Lain lagi yang dilakukan Sumali. Dia malah membiarkan sawahnya di Dusun Wangkal, Desa Renokenongo, dicangkul alat berat. Tiga mesin pe-

ngeruk menggaruk tanaman padinya yang baru berumur dua bulan. Ada 17 hektare sawah di dusun itu yang bernasib sama seperti yang dialami Sumali. Juga, belasan hektare sawah di Desa Jatirejo. Sawah mereka disulap menjadi waduk penampung lumpur seluas 80 hektare dengan daya tampung lumpur hingga 250 ribu meter kubik. Dengan asumsi volume semburan 5.000 meter kubik per hari, umur kolam penampungan tersebut tak lebih dari dua bulan.

Untuk mengganti kerugian petani, menurut Sumali, Lapindo menyewa sawah selama dua tahun serta memberi ganti rugi atas sawah yang terendam. Kesepakatan lainnya, Lapindo juga bertanggung jawab membersihkan lumpur di sawah itu bila semburannya sudah teratasi. Jika setelah bersih tanahnya tidak bisa ditanami lagi, Lapindo harus membeli tanah sawah bekas penampungan tersebut. "Tapi saya masih ragu, apa benar Lapindo mau membeli jika sawah saya tidak subur lagi," kata Sumali.

Namun, Lapindo sejak awal menegaskan tidak akan membeli sawah petani. Mereka hanya mau membayar ganti rugi dengan sewa selama dua tahun. "Kami telah mengeluarkan dana Rp 6,5 miliar untuk keperluan sewa lahan itu," kata General Manager PT

Lapindo Brantas, Iman P. Agustino.

Dana itu belum termasuk ongkos membersihkan racun-racun yang mencemari sawah. Menurut hitungan Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo, hingga pekan lalu tercatat 152 hektare sawah di empat desa tenggelam dalam lumpur. Sawah-sawah itu, walaupun lumpurnya bisa dihentikan, tak bisa langsung ditanam karena sudah ditimbuni zat-zat logam, seperti natrium, aluminium, besi, klor yang kadarnya kelewat tinggi. Hasil uji Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menunjukkan kadar logam itu pada level meracuni tanaman. Lembaga ini memang ditunjuk Lapindo untuk meneliti kadar racun dalam lumpur.

Syekhfani, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, menjelaskan, tingginya kadar besi dan mangan tak hanya membuat tanaman keracunan. Bila tanaman itu dikonsumsi manusia, zat tersebut juga merontokkan fungsi hati.

Untuk mengatasinya, pakar kimia tanah dari Universitas Brawijaya itu menyarankan, setelah lumpur dibuang, sawah dicuci dan diurug dengan tanah baru yang steril dari lumpur. Namun, proses reklamasi ini butuh waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Maukah Lapindo menanggungnya?

UWD, Kuku S. Wibowo, Rohman Taufiq, Bibin Bintariadi

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 50

TAHUN 2006

Sebuah Halaman yang Tenggelam

PETAKA itu datang pagi-pagi. Ketika itu orang masih mencecap udara pagi dan menikmati kopi. Tiba-tiba saja ubin keramik melengkung, bergemeretak, dan akhirnya, boom! Orang-orang berlarian. Sejak itulah mengalirkan derita di kampung miskin di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Dan segera Renokenongo, Siring, Kedungbendo, menjadi kampung yang getir.

Lumpur dari sumur PT Lapindo Brantas Incorporated tak hanya menenggelamkan rumah, sawah, pabrik, bahkan becak, tapi juga melunturkan cita-cita hidup. Sekitar 1.112 buruh dirumahkan, tak tahu kapan gaji mereka dibayar. Jalan tol Gempol-Surabaya pun jadi jalanan mati. Sunyi. Padahal, jalan inilah yang mengalirkan denyut-denyut bisnis yang efeknya bisa bergetar sangat keras bagi pabrik-pabrik, buruh, tukang becak, bahkan sampai ke penjual mi instan.

Sejarah seperti mengendap di jalan tol ini. Diam. "Dalam sehari, rugi semiliar rupiah gara-gara jalan tol tak berfungsi," begitu kata ekonom lokal Surabaya.

Para siswa SD juga harus diungsikan. Meski sekolah tak tergenang lumpur, siapa yang tahan mengerjakan Ujian Akhir Nasional sambil menghirup udara busuk seperti kentut? Akhirnya, mereka harus mengerjakan ujian di tengah pasar Porong yang kisruh dan hiruk-pikuk dengan ribuan pengungsi. Jika anak-anak Porong itu tak lulus Ujian Akhir Nasional, apakah Lapindo dan Grup Bakrie, pemilik Lapindo, peduli?

Demi secuil tanah yang tersisa, kini desa-desa di dekat sumur petaka Lapindo membangun tanggul-tanggul setinggi orang dewasa. Mereka juga terpaksa meronda di balik tanggul-tanggul itu

dengan sejumput rasa waswas: apakah kampung akan selamat dari lahapan lumpur?

Demi menyambung hidup, orang-orang kampung Kedungbendo itu juga terpaksa merayapi lumpur bau, mengais-kais barang yang bisa diselamatkan di rumah mereka. Tapi, tak banyak barang yang tersisa. Akhirnya, sebagian warga terpaksa mengutip biaya dari orang-orang yang datang menonton lumpur dan menjadi "turis dadakan".

Sudah satu purnama lumpur menelan harapan warga Porong. Dan sampai kini, tak ada tanda-tanda kapan petaka yang bermula dari sumur sedalam dua kilometer lebih itu akan berakhir. Sepasukan tentara sudah didatangkan untuk membangun jembatan, menyedot lumpur. Geolog-geolog terbaik di negeri ini dan dari Australia juga didatangkan. Tapi, lumpur masih terlalu perkasa. Lumpur mencopot mata bor, lalu mener-

jang melalui celah-celah gelap di perut bumi dan menyembur ke setinggi enam meter.

Lumpur telah menyedot sisa-sisa harapan warga Porong. Kini yang tersisa adalah cerita yang kelam, riak lumpur yang menggelegak, dan bau busuk yang bikin mual. Cita-cita dan halaman itu kini semakin tenggelam.

Foto: Bernard Chaniago, teks: Burhan Solihin

53.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2006

Lapindo Brantas dan Corporate Social Responsibilities

ELVIA IVADA

Dosen FE UMS,
Mahasiswa Program Pascasarjana Undip,
Semarang

MENGHERANKAN rasanya apabila kasus luapan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas, setelah menyusahkan banyak pihak, model penyelesaiannya dikatakan sebagai tanggung jawab bersama. Kata bersama, berarti juga mengikutkan masyarakat yang tanah, rumah atau sawahnya terendam lumpur PT Lapindo. Atau mungkin pihak lain yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Lapindo, pembayar pajak misalnya, yang oleh pemerintah melalui APBN, pajak tersebut digunakan untuk membiayai perbaikan sarana dan prasarana umum akibat kerusakan oleh lumpur PT Lapindo.

Dalam kasus tersebut, dikatakan tidak ada unsur kesengajaan. Namun, jika kita perhatikan pernyataan ketiga saksi dari PT Medici Citra Nusa selaku subkontraktor yang dikutip beberapa media massa, menyatakan bahwa penyebabnya tidak digunakannya selubung atau casing pada kedalaman 8.750 kaki yang seharusnya dipasang pada kedalaman 8.500 kaki. Media lainnya menyebut tidak dipasang casing pada kedalaman 9.000 kaki. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan, karena secara prosedural, casing tersebut mutlak diperlukan.

Dalam hal ini, semestinya Lapindo mengetahui semua prosedur yang harus dilakukan dan sedang dilakukan pada pekerjaan pengeboran. Terlebih, masih dalam berita tersebut, sebenarnya kejadian *loss circulation* dapat diprediksi, tetapi titiknya tidak dapat diketahui secara pasti. Fakta yang menunjukkan adanya salah satu prosedur yang tidak dijalankan dan ketidakmampuan untuk mencegah atau menghindari *loss circulation* tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian internal

pada Lapindo atau PT Energi Mega Persada sebagai perusahaan induk yang menaungi Lapindo Brantas. Dalam hal ini adalah kurang berfungsinya dewan komisaris dan komite audit serta kurang efektifnya metode pengendalian manajemennya.

Dalam hal ini, kita tidak dapat sepenuhnya menunjukan kesalahan kepada PT Medici dengan dalih yang melakukan pengeboran dengan meniadakan salah satu prosedur sehingga menyebabkan luapan lumpur panas tersebut adalah PT Medici. Di sinilah, salah satu fungsi dari dewan komisaris Lapindo melalui komite auditnya, yaitu menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit Lapindo seharusnya melakukan pengawasan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Dengan kata lain, semestinya komite audit mengetahui kesepakatan prosedur pengeboran yang dilakukan antara Lapindo dan PT Medici serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan tersebut. Apabila ternyata PT Medici memang terbukti sebagai pihak yang bersalah, masih tetap saja Lapindo mempunyai andil atas kesalahan tersebut. Lagi-lagi, pengendalian internal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena penunjukan PT Medici sebagai subkontraktor seharusnya didasarkan pada kualifikasi Medici. Peniadaan salah satu prosedur, ketidakmampuan dalam menghindari *loss circulation*, dan menentukan titik semburan menunjukkan Medici tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Komite audit dan fungsi pengendalian lain pada Lapindo, semestinya mengetahui tingkat kualitas pekerjaan Medici tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan tanggung jawab terjadinya luapan lumpur panas itu ada pada Lapindo sehingga tanggung jawab perbaikan dan penyelesaiannya juga ada pada Lapindo.

Kontrak Sosial .

Lebih jauh, merujuk pada *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan secara kontinu berusaha untuk menjamin bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma masyarakat. Dengan demikian, perusahaan berusaha untuk menjamin bahwa aktivitasnya diterima oleh pihak lain dalam hal ini *stake holder* sebagai sah atau "*legitimate*" (Deegan:2004).

Dalam kasus Lapindo tersebut, jelas terlihat bahwa aktivitas yang dilakukannya merugikan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas tersebut tidak dapat dianggap sah atau "*legitimate*". Pandangan dalam teori tersebut berdasar pada sebuah anggapan bahwa terdapat sebuah "kontrak sosial" antara perusahaan dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah sebuah konsep untuk menjelaskan harapan-harapan eksplisit dan implisit yang dimiliki masyarakat (lingkungan) mengenai bagai-

SA.

mana perusahaan seharusnya menjalankan aktivitasnya. Harapan tersebut dapat dikatakan sebagai harapan sosial, yang mengacu bahwa perusahaan yang sukses akan bereaksi dan memperbaiki konsekuensi lingkungan, manusia, dan konsekuensi lainnya sebagai akibat aktivitas yang dilakukannya (Heard & Bolce 1991, dalam Deegan:2004).

Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab perbaikan semua sarana dan prasarana yang rusak akibat lumpur Lapindo ada pada Lapindo sendiri. Meskipun demikian, masih terdapat satu kemungkinan bahwa kesalahan tidak sepenuhnya pada Lapindo, tetapi berada pada PT Medici, yaitu apabila prosedur yang disepakati antara PT Medici dan Lapindo tidak terdapat kesalahan, sedangkan dalam pelaksanaannya, oleh PT Medici diselewengkan atau terlewatkan atau terjadinya wan prestasi.

Corporate Social Responsibilities

Terlepas dari ada tidaknya unsur kesengajaan pada kasus tersebut dan apakah Lapindo atau Medici yang bersalah, Lapindo mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibilities) yang harus diembannya. Tanggung jawab sosial tersebut meliputi tanggung jawab sosial secara eksternal dan internal. Secara eksternal, meliputi: tanggung jawab & peluang baru, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan konsumen, pencemaran lingkungan, pengemasan, hubungan dengan investor, hubungan dengan pemegang saham. Sedangkan secara internal meliputi: lingkungan fisik, kondisi kerja, golongan minoritas, struktur organisasi dan gaya manajemen, komunikasi, hubungan perburuhan, dan pelatihan. Maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak saja berkenaan dengan dampak lingkungan, namun meliputi seluruh dampak sosial yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Apabila kita kaitkan dengan kasus yang terjadi pada Lapindo, tanggung jawab sosial tersebut meliputi semua pihak yang secara sosial terpengaruh dengan aktivitas Lapindo. Setelah adanya kasus semburan lumpur, pihak yang secara sosial terpengaruh, dapat dengan mudah kita lihat sebagai pihak yang dirugikan. Yang paling dirugikan, tentu saja adalah masyarakat yang propertinya terendam lumpur Lapindo, kemudian karyawan yang akibat kasus tersebut menjadi tidak dapat bekerja secara normal, pengguna sarana dan prasarana umum yang terendam lumpur seperti pengguna tol. Pemerintah sebagai penyedia sarana

dan prasarana umum yang terendam lumpur ikut dirugikan karena sarana dan prasarana yang disediakan mengalami penyusutan nilai yang lebih cepat dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan kasus tersebut, tanggung jawab sosial Lapindo setidaknya meliputi tanggung jawab dalam hubungan dengan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan hubungan perburuhan. Tanggung jawab yang berhubungan dengan masyarakat mempunyai implikasi yang luas, setidaknya secara materiil Lapindo seyogianya mengganti properti milik masyarakat yang rusak akibat lumpur Lapindo dan biaya pengobatan masyarakat yang terkena penyakit akibat adanya kandungan gas beracun pada lumpur tersebut. Kemudian secara immateriil, dua kelompok masyarakat yang bertikai akibat pembangunan tanggul, merupakan tanggung jawab Lapindo untuk mendamaikan kembali.

Tanggung jawab dalam pencemaran lingkungan, Lapindo harus membersihkan seluruh lumpur yang menggenangi area yang tercemar, kemudian mengembalikan area tersebut seperti kondisi semula. Sawah yang semula menghasilkan tebu, seyogianya dikembalikan keadaannya dalam keadaan dapat menghasilkan tebu dengan kualitas sama seperti sebelum tergenangi lumpur panas beracun, udara yang semula dapat dihirup tanpa menimbulkan penyakit apa pun, seyogianya dikembalikan seperti semula, air yang semula dapat diminum seyogianya juga dikembalikan seperti itu.

Tanggung jawab yang berhubungan dengan perburuhan, Lapindo semestinya tetap mempertahankan hak buruh selama kasus luapan lumpur terjadi. Gaji buruh seyogianya tetap dibayarkan secara normal, kecuali jika kesepakatan antara buruh dan Lapindo menyepakati hal lain.

Mengemban dan melaksanakan tanggung jawab sosial, adalah salah satu kewajiban perusahaan yang tentu saja memerlukan pengorbanan yang sama sekali tidak ringan. Namun apabila hal itu tidak dilakukan, konsekuensinya adalah pembatasan-pembatasan oleh masyarakat. Misalnya sumber daya, dalam hal ini masyarakat enggan dalam memberikan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja atau sumber daya finansial (oleh investor) atau penolakan operasi perusahaan di masa datang. Dan yang paling mungkin, adalah sanksi yang diberikan masyarakat seperti adanya tuntutan hukum dari masyarakat yang bisa jadi menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang lebih besar. Sehingga mau tidak mau, Lapindo harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya (*)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2006

Jika BP Migas Gagal

Lumpur Panas Lapindo Bisa hingga Oktober

Oleh
CHUSNUN HADI

Jika sampai skenario pertama dan kedua gagal, berarti semburan lumpur panas itu berlangsung hingga Oktober mendatang.

"Hingga saat ini kami belum mengetahui secara persis keberadaan mata bor (fish) di dalam tanah. Kemungkinan mata bor tersebut masih berada di tempatnya semula pada kedalaman 400 meter di bawah permukaan tanah, atau sudah jatuh ke dasar sumur dengan kedalaman 9.000 feet," kata Trijana Kartoatmodjo, Ketua Tim I yang bertugas menghentikan semburan lumpur, usai rapat koordinasi tim penanganan lumpur panas Porong di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (30/6) malam.

Menurut Trijana, skenario pertama, diasumsikan fish jatuh ke dasar sumur. Penanganan untuk skenario ini relatif lebih mudah, yakni tinggal melakukan pengeboran menembus tiga lapis semen di atas fish, kemudian memasukkan lumpur berat dan semen untuk menutup sumur Banjar Panji 1.

"Jika skenario ini berlangsung sukses dan berhasil menghentikan semburan lumpur, prosesnya akan selesai pada 10 Juli 2006 mendatang. Tetapi jika ini gagal, kita masuk ke skenario kedua," jelas Trijana, yang juga Wakil Kepala BP Migas.

Sidoarjo - BP Migas mempersiapkan tiga skenario untuk mematikan semburan lumpur panas di area pengeboran Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo.

Pada skenario kedua, diasumsikan fish masih berada di tempatnya pada kedalaman 400 meter. Prosesnya adalah melakukan pengeboran miring menuju dasar sumur. Lumpur berat dan semen dimasukkan lewat jalan tersebut untuk menghentikan semburan lumpur. Untuk skenario ini dibutuhkan waktu hingga 2 Agustus 2006 mendatang.

Jika upaya ini gagal lagi, dilakukan penanganan terakhir adalah memasang relief well, di mana pengisian lumpur berat dan semen melalui pengeboran drilling di titik lain yang jaraknya sekitar 500 meter dari pusat semburan lumpur. "Upaya ini baru bisa diselesaikan pada 7 Oktober 2006. Tetapi kita berharap skenario pertama sudah bisa menutup semburan lumpur tersebut," tandasnya.

Butuh Lahan

Sementara itu, Gempur Adnan, Deputy Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, menyatakan masih dibutuhkan sekitar 20 hektare lahan lagi untuk menampung lumpur panas untuk mengantisipasi jika upaya mematikan semburan lumpur ini hingga memasuki skenario ketiga.

Hingga Jumat kemarin, telah terealisasi kolam penampungan sekitar 933.600 meter kubik dan telah terisi lumpur sekitar 422.600 meter kubik. Sedangkan targetnya adalah membuat tujuh kolam dengan

kapasitas 1.025.000 meter kubik. "Kolam seluas 1.025.000 meter kubik itu kalau kita hitung sudah penuh pada 29 Juli 2006 mendatang," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya mengungkapkan bahwa dari evaluasi yang dilakukan Pokja Pengelolaan Air dan Lumpur menunjukkan bahwa lumpur, air sumur dangkal, air saluran/sungai, dan udara di sekitar banjir lumpur tidak sehat untuk manusia.

Sampel lumpur solid (padat) dan liquid (cair) secara kualitatif menunjukkan adanya kadar hidrokarbon. "Untuk ini Pokja merekomendasikan masyarakat jangan bersentuhan secara langsung dengan lumpur, petugas lapangan juga wajib menggunakan masker gas, kacamatanya, sarung tangan, dan baju lengan panjang," tandasnya.

Air sumur pun dipantau mengandung konsentrasi TDS, Fe, Mn & Cl - di Balongkenongo dan Siring melebihi Baku Mutu Air Bersih berdasarkan Permenkes No 416/1990. "Kita harap masyarakat tidak mengonsumsi air sumur pada daerah permukiman yang tergenang lumpur sebagai bahan baku air minum dan keperluan memasak," jelasnya.

Meski semburan lumpur tersebut bukan sebagai bencana alam, Pemkab Sidoarjo ngotot mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan sebesar Rp 103 miliar untuk mengatasi bencana luapan lumpur Porong yang terjadi sejak 29 Mei lalu. "Surat pengajuan sudah kami kirim, menyangkut 11 bidang yang berkenaan langsung dengan musibah lumpur panas," ujar Bupati Sidoarjo Wien Hendarso. ■

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ALAMAN: 23

TAHUN 2006

SEMBURAN LUMPUR

PT Lapindo Siapkan 'Relief Well'

SIDOARJO (Media): PT Lapindo Brantas Inc menyiapkan alternatif penutupan sumber semburan lumpur panas dengan sistem *relief well* (pengeboran miring) yang ditempatkan di sekitar Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Demikian diungkapkan General Manager PT Lapindo Brantas Inc Imam Agustino kepada wartawan di Sidoarjo, kemarin.

Relief well merupakan alternatif terakhir jika upaya mendeteksi semburan lumpur panas menggunakan *snubing unit* tidak membuahkan hasil. Persiapan membuat *relief well* telah dilakukan oleh tim dari PT Lapindo Brantas di sekitar

Desa Jatirejo, kemarin.

Sejumlah alat berat disiapkan untuk menutup tanah di sekitar Desa tersebut. Selain itu, pipa sepanjang 20 meter serta fondasi terbuat dari beton telah disiapkan di lahan seluas 300 meter persegi yang disiapkan untuk mendirikan *relief well*.

Imam mengaku kesulitan untuk mencari rig yang berdaya 1.500 horse power (HP) untuk metode *relief well* itu. Sebab, peralatan rig ini sudah dimobilisasi dari Pulau Seram dan dijadwalkan akan tiba di Surabaya 15 Juli mendatang, sekaligus mendatangkan tenaga ahli dan peralatan dari perusahaan Australia (Century Resources).

"Perusahaan ini pernah sukses menangani bencana luapan lumpur dari kegiatan eksplorasi gas dan minyak di Bangladesh. Saat ini yang kami butuhkan tidak hanya peralatan canggih, tetapi juga sebuah tim yang bisa menangani dengan baik," ujarnya.

Buang ke laut

Sementara itu, Satlak penanggulangan bencana lumpur Porong menyiapkan skenario membuang lumpur panas ke laut di pesisir Sidoarjo. Skenario membuang lumpur panas ke laut di pesisir timur Sidoarjo merupakan langkah terakhir kalau ternyata sampai pertengahan Agustus lumpur tidak juga bisa dihentikan.

"Kolam penampungan yang sudah disiapkan daya tampungnya sangat terbatas, diperkirakan akan penuh pada akhir Juli atau paling lama pada pertengahan Agustus," kata Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Illah kepada wartawan di Surabaya, kemarin.

Menurut Syafil, dari delapan kolam penampungan di empat desa, lumpur yang bisa ditampung kira-kira di atas satu juta meter kubik. Sedangkan semburan lumpur dari hari ke hari makin besar.

Terakhir disebut-sebut mencapai 5.000 meter kubik per hari, naik dari semburan awal 50.000 meter kubik per harinya.

(FL/HS/X-10)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2006

SEMBURAN LUMPUR

Disusun Tiga Skenario Penanggulangan

SIDOARJO, KOMPAS – Semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin menyengsarakan masyarakat. Bukan hanya masyarakat sekitar, seperti tergenangnya 120 hektar sawah dan mengungsinya 6.236 penduduk, tetapi juga dirasakan penduduk Surabaya, Malang, Kabupaten Jember, Pasuruan, dan Lumajang. Praktis berbagai aktivitas mereka terganggu.

Lalu lintas Malang-Surabaya yang biasanya lancar dan hanya ditempuh lebih kurang satu setengah jam, Sabtu (1/7) pagi hingga petang rata-rata ditempuh antara lima sampai tujuh jam. Kemacetan parah terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, karena Jalan Tol Surabaya-Gempol sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan akibat tergenang lumpur setinggi 60-80 sentimeter.

Bus dari Terminal Bungurasih, Surabaya, yang biasanya berangkat setiap 10 menit untuk tujuan Malang, sudah sebulan ini hanya berangkat setiap jam karena kekurangan penumpang. Jika tidak terlalu mendesak, masyarakat enggan pergi ke Kota Malang, Batu, maupun Kabupaten Pasuruan karena lamanya waktu perjalanan.

"Bagi para pengusaha angkutan, kemacetan dan tidak berfungsinya jalan tol sangat merugikan," kata Ketua Organda Jawa Timur Mustafa.

Mustafa menjelaskan, akibat pengalihan jalur dan kemacetan lalu lintas, rata-rata setiap bus harus menambah solar 30 liter. Artinya, ada pengeluaran tam-

bahan Rp 120.000 sekali bus jalan. "Padahal, tidak boleh ada kenaikan tarif kepada penumpang," kata Mustafa.

Dalam kondisi normal, terdapat sekitar 1.000 bus kelas ekonomi dan 196 bus patas trayek Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Namun, kini sebagian bus tersebut terpaksa dikandangkan.

Begitupun angkutan travel Surabaya-Malang serta angkutan peti kemas sangat terpuak akibat ditutupnya jalan tol yang tergenang lumpur. Bahkan, hotel-hotel di Kota Malang dan di Kota Batu yang biasanya ramai setiap pekan kini tampak kekurangan pengunjung. Tempat wisata di sekitar Malang dan Pasuruan juga terlihat sepi meskipun kini musim liburan sekolah. Masyarakat terkesan enggan terjebak kemacetan.

Sementara itu, masyarakat di sekitar lokasi semburan lumpur kini terancam konflik horizontal. Pasalnya, sebagian masyarakat, seperti di Desa Siring, meminta tanggul dijebol agar genangan lumpur tidak semakin tinggi menggenangi rumah mereka. Sebaliknya, masyarakat Desa Renokenongo tidak mau rumahnya terendam lumpur sehingga ingin tetap mempertahankan tanggul.

Tiga skenario

Sementara itu, Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas atau BP Migas serta PT Lapindo Brantas merencanakan tiga skenario untuk menghentikan semburan lumpur panas dan gas.

Jika skenario pertama berhasil, semburan lumpur bisa dihentikan 10 Juli. Akan tetapi, bila tidak berhasil, digunakan skenario kedua dengan kemungkinan lumpur baru bisa dihentikan 7 Oktober 2006.

Tiga skenario ini merupakan hasil evaluasi tim penanganan bencana lumpur panas yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Imam Utomo. Evaluasi ini dihadiri Wakil Kepala BP Migas Trijana Kartoatmodjo, General Manager Lapindo Brantas Imam Agustino, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Gempur Adnan, dan Panglima Kodam V Brawijaya Syamsul Mappareppa.

Skenario pertama adalah menggunakan *snobbing* dan menyuntikkan lumpur berat serta semen ke sumur Banjar Panji 1. Skenario kedua tetap menggunakan *snobbing* unit dan masuk ke Sumur Banjar Panji 1, tetapi lubanganya memutar untuk sampai pada sumur di bawah bor. Lalu menyuntikkan lumpur berat dan semen. Apabila berhasil, semburan akan berhenti pada tanggal 2 Agustus.

Skenario ketiga menggunakan *relief well*. Caranya dengan membuat sumur baru yang berjarak sekitar 500 meter dari semburan. Lalu membuat sumur yang membelok dan bermuara di sumur Banjar Panji 1, tepatnya di bawah bor.

"Ketiga skenario ini dijalankan bersamaan sehingga jika skenario pertama tidak berhasil, dilanjutkan skenario berikutnya," kata Imam Agustino. (THY/LAS)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 9

TAHUN 2006

Luberan Lumpur Sidoarjo 100 Meter dari Rel KA

[SIDOARJO] Rembesan air dari lumpur panas sudah sampai 10 meter mendekati tanggul penahan lumpur yang dibangun Lapindo Brantas di jalur rel kereta api (KA) antara Desa Siring sampai Desa Jatirejo, Kecamatan Porong. Sementara genangan lumpurnya sendiri sudah mencapai sekitar 100 meter dari tanggul sampai Kamis (29/6).

Padahal sehari sebelumnya jarak luberan lumpur sampai tanggul masih sekitar 300 meter. Pembuatan tanggul setinggi dua meter serta jaraknya sekitar tiga meter dari badan rel KA, dengan mempergunakan tanah yang diambil dari sawah milik warga, terus dikerjakan dengan pengerahan tujuh alat berat. Pekerjaan pembuatan tanggul ini dikawal anggota TNI AD.

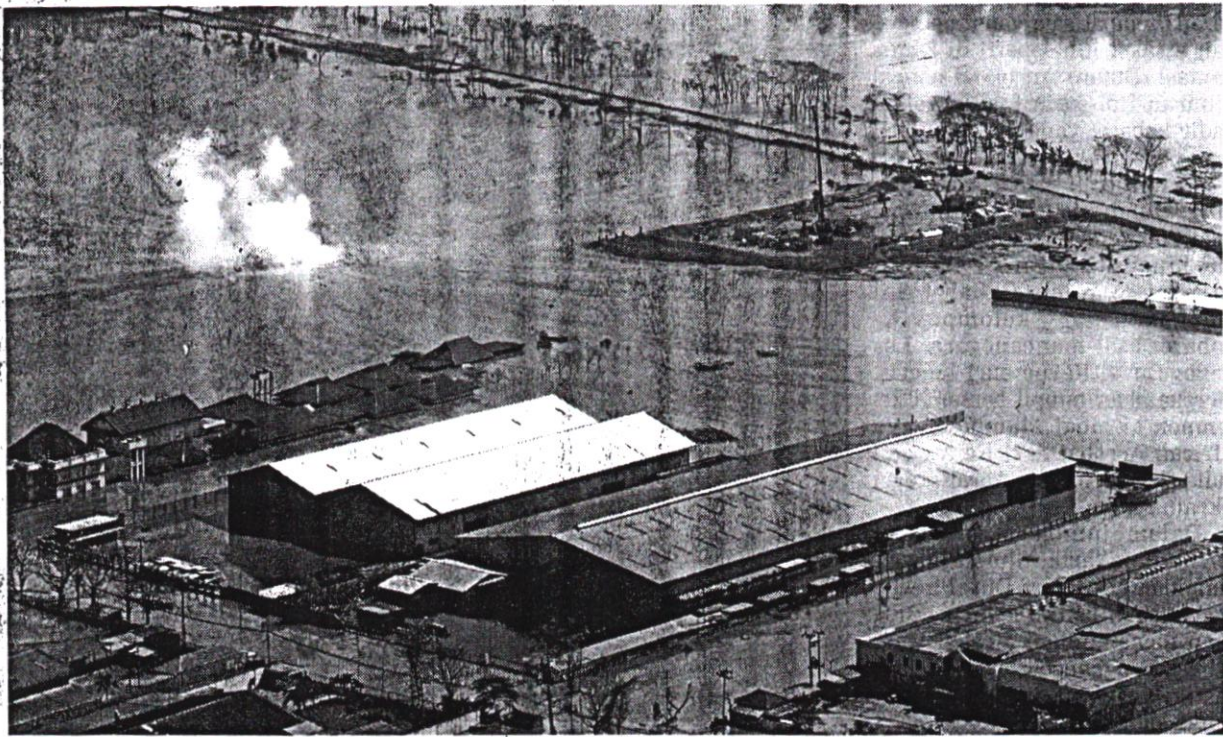
Sementara itu, Humas Daops 8 PT KA, Sudarsono mengatakan, dengan pembuatan tanggul setinggi dua meter diharapkan bisa menahan lumpur. "Kita berharap tidak sampai melewati batas tanggul, jika hal ini terjadi akan mengancam keselamatan perjalanan kereta api," katanya.

Biaya Hidup

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno mengatakan, para pekerja selain menerima bantuan biaya hidup dari Lapindo, hendaknya juga mendapatkan bantuan sosial sebagaimana halnya para pengungsi. Lapindo menyerahkan dana Rp 1,3 miliar kepada 13 perusahaan yang mempekerjakan 1.637 buruh.

Setiap pekerja mendapatkan bantuan biaya hidup Rp 700.000 per bulan. Bantuan yang diberikan sekarang merupakan tahap pertama atau bulan pertama dari rencana dua bulan. Sementara itu Ketua SP-SI Sidoarjo, Didik Bagio Utomo mengatakan, Tim Terpadu Ketenagakerjaan Sidoarjo yang terdiri dari Dinasaker Sidoarjo, SP-SI, Lapindo memantau penyaluran dari setiap perusahaan kepada karyawannya, karena tim memiliki data nama dan alamat pekerja.

"Soal apakah bantuan biaya hidup cukup atau tidak, tentu saja ini sangat relatif. Tetapi ini kesepakatan



Lumpur merendam rumah, pabrik dan sawah di sekitar sumber semburan lumpur panas bercampur gas, milik PT Lapindo Brantas Porong, Selasa (27/6). [Antara/Eric Ireng]

an yang dicapai antara Disnaker, SPSI dan Lapindo. Sementara bantuan biaya hidup untuk bulan kedua, masih kita tunggu sampai distribusi bantuan biaya hidup bulan pertama ini selesai," katanya.

Sebanyak 13 perusahaan yang buruhnya menerima bantuan biaya hidup, yakni PT Catur Putra Surya 154 orang, PT Supra Surya Indonesia 70 orang, PT Sari Inti Pratama 346 orang, PT Primapindo Pangan Makmur 225 orang, PT Victory Rotan Indah 168 orang, PT Gunungmas Santosa Raya 123 orang, PT Erlangga 158 orang, PT Srikaya Puramas 104 orang, PT Emanirlenda 28 orang, CV Karya Kasih Kurnia 92 orang, PT Debrima 127 orang, PT Niagara Prima 26 orang, CV Semangat Jaya 98 orang.

Sementara dua perusahaan, yakni PT Sampoerna dan PT Arcivic Baja Indonesia belum menerima ganti rugi karena data-datanya belum masuk ke tim Lapindo. Lapindo juga menyerahkan bantuan kepada sekitar 1.700 warga Desa Renokeno-

ngo. Setiap jiwa tanpa ada batasan usia mendapatkan bantuan biaya hidup Rp 300.000 per bulan seperti yang sebelumnya diberikan kepada warga Desa Siring.

Secara terpisah Ketua Tim Peduli Korban Lumpur Lapindo, Ismail Modal dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, masyarakat yang dirugikan atas semburan lumpur panas ini, dapat mengadakan ke posko pengaduan yang dibentuk tim peduli korban lumpur Lapindo. Selain menerima pengaduan, tim peduli juga akan menjalin kerja sama dengan elemen masyarakat lain.

"Kami bentuk posko ini agar masyarakat yang dirugikan memiliki tempat mengadu dan kami dapat memberikan bantuan untuk mendapatkan keadilan. Kami bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan buruh serta lembaga bantuan hukum untuk mengadvokasi kerugian masyarakat," katanya.

Dikatakan, posko pengaduan dibentuk di enam wilayah yakni, Ma-

lang, Kota Batu, Probolinggo, Situbondo, Kediri, dan Bojonegoro.

Luas lahan tanaman padi yang rusak akibat endapan lumpur panas di Sidoarjo, terus bertambah sampai Kamis (29/6) mencapai 126,39 ha. Lahan tebu seluas 17,03 ha dan ratusan ha tambak terancam, jika luberan lumpur panas dialirkan ke tambak milik masyarakat.

Tanaman padi yang mengalami kerusakan tersebar di desa-desa Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo dan Sentul. Sedangkan untuk lahan tebu terdapat di Renokenongo dan Jatirejo. "Warga berharap agar proses penyumbatan pusat semburan berjalan lancar, sehingga luberan lumpur tidak semakin meluas," kata Koordinator Tim Pelaporan, Harjadi Purwantoro, mengutip harapan pengungsi di Sidoarjo.

Menurut Harjadi, jumlah pengungsi juga bertambah di Pasar Baru Porong, menjadi 1.591 KK (6.435 jiwa). Sedangkan pengungsi di Balai Desa Renokenongo mencapai 188 KK (725 jiwa). [029/080]

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A.8

TAHUN 2006

Lumpur Lapindo Dialirkan ke Selat Madura

Luapan lumpur meningkat dari 5.000 menjadi 50.000 meter kubik per hari.

SIDOARJO — Luapan lumpur panas dari kilang Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, akan dialirkan ke laut pesisir Sidoarjo atau Selat Madura. Langkah ini dilakukan mengingat kolam penampungan lumpur yang ada hanya mampu menampung hingga akhir Juli. "Langkah terakhir akan dibuang ke laut. Langkah ini dilakukan jika sampai pertengahan Agustus lumpur masih belum bisa dihentikan," kata Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Illah kemarin.

Pembuangan lumpur ke Selat Madura, dia melanjutkan, akan dialirkan melalui kali Porong, yang berjarak sekitar 1 kilometer arah selatan dari pusat semburan lumpur. Dari kolam-kolam pe-

nampungan lumpur akan disalurkan melalui pipa-pipa penyedot serta diangkut dengan truk menuju kali Porong, yang mengalir ke laut pesisir Sidoarjo.

Saat ini dari delapan kolam penampungan lumpur yang tersebar di empat desa, Renokenongo, Siring, Jatirejo, dan Balongbendo, hanya mampu menampung sekitar satu juta meter kubik. Padahal, menurut Syaiful, luapan lumpur saat ini telah meningkat dari 5.000 menjadi 50.000 meter kubik per harinya.

Syaiful mengakui pembuangan ke pesisir Sidoarjo tersebut akan mempengaruhi tingkat pencemaran air di ratusan meter kubik tambak warga di sekitar laut pesisir Sidoarjo. Namun, ia berjanji akan memberikan pengertian kepada para pemilik tambak, termasuk mengupayakan ganti rugi bagi mereka.

Beberapa alat berat mulai kemarin pagi dikerahkan untuk

membuat tanggul-tanggul pembatas di sisi timur rel kereta api arah Surabaya-Malang. Sebab, luapan lumpur mulai mengancam menggenangi rel kereta api yang berada di Desa Jatirejo.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kardaya Warnika mengatakan PT Lapindo tetap bisa mengajukan klaim pengembalian biaya operasi atau *cost recovery* kepada pemerintah. Sebab, masih dimungkinkan di daerah tersebut dapat ditemukan minyak ataupun gas bumi.

Berdasarkan pengalaman eksplorasi sebelumnya, kata dia, bisa saja di sekitar daerah tersebut ditemukan minyak. Kardaya mencontohkan semburan lumpur di salah satu sumur minyak Jatibarang, Cirebon. Setelah itu, seratus meter dari sumur tersebut dilakukan pengeboran kembali dan ternyata berhasil ditemukan minyak.

● ROHMAN TAUFIQ | AGUS SUPRIYANTO | MUHAMAD FASABENI

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 26

TAHUN 2006

Udara Bersih Sulit Diwujudkan

Sumber Energi Alternatif Belum Terjamin

JAKARTA, KOMPAS — Udara bersih di Jakarta sulit diwujudkan selama hukum tidak secara tegas dijalankan. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara tidak sepenuhnya dilaksanakan karena kewajiban uji emisi bagi setiap kendaraan juga tidak dilakukan.

"Kita bisa mengambil contoh dari India. Hukum di sana secara keras dilaksanakan. Dalam waktu tiga tahun, sekitar 70 persen polusi di beberapa kota dapat dihilangkan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di sela-sela acara lomba lari Jakarta International 10K-2006, Minggu (2/7) di Silang Monas.

Kewajiban uji emisi kendaraan di Jakarta, kata Fauzi, yang mendesak saat ini adalah untuk kendaraan angkutan umum. Perda No 2/2005 belum secara ketat

diberlakukan, terbukti dari operasionalisasi angkutan umum di Jakarta yang masih banyak mencemari udara.

"Untuk uji emisi kendaraan pribadi, saya melihat inisiatif publik termasuk baik, tetapi penerapan hukum secara keras itu lebih penting," kata Fauzi.

Energi alternatif

Fauzi menyinggung pula penggunaan sumber energi alternatif berupa bahan bakar gas dan biodiesel yang memang dibutuhkan

di Jakarta untuk meraih kualitas udara bersih, tetapi sampai sekarang masih ada kendala kontinuitas keduanya belum mampu terjamin.

"Untuk menambah angkutan umum berbahan bakar gas, sampai sekarang dihadapkan pada masalah kebutuhan lebih banyak lagi stasiun-stasiun pengisiannya. Belum lagi masih dihadapkan pada masalah kualitas tekanan bahan bakar gas yang kurang baik," kata Fauzi mengungkapkan.

Fauzi menyinggung kendala yang dihadapi bus transjakarta koridor II dan III, yang selama ini juga masih menghadapi masalah kualitas tekanan bahan bakar gas yang kurang baik. Dalam waktu dekat pemerintah masih mengupayakan uji coba stasiun pengisian bahan bakar gas dengan tekanan gas yang sesuai.

(RIS/NAW)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 44		TAHUN 2006

BENCANA ALAM

Sampai Kapan Lumpur Akan Menyembur?

Seorang warga Desa Siring yang awam soal pertambangan mengatakan, apa pun penyebabnya, hal yang pasti adalah tidak mungkin bencana lumpur panas terjadi apabila Lapindo Brantas Inc tidak melakukan pengeboran di areal sekitar 300 meter dari rumahnya.

Semburan lumpur panas dan gas berbau menyengat dari tengah areal sawah Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berawal pada 29 Mei sekitar pukul 06.00. Titik semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas yang tengah melakukan eksplorasi.

Setiap hari, sekitar 50.000 meter kubik lumpur keluar dari perut bumi. Jumlah ini setara dengan 12.500 truk pengangkut lumpur setiap hari. Padahal, sekarang sudah hari ke-33 sehingga setidaknya sudah 1,5 juta meter kubik yang keluar dari dalam bumi.

Tidak kurang dari 200 hektar lahan yang sudah tergenang lumpur, mulai dari sawah, permukiman, kebun tebu, hingga jalan tol Surabaya-Gempol.

Dampak sosial ekonominya, menurut Ketua Dewan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Latief Burhan, akan terasa dalam jangka pendek dan menengah. "Hal ini akan sangat terasa pada warga yang sawahnya rusak dan rumah berikut harta bendanya hancur diterjang lumpur," kata Burhan.

Masih teka-teki

Mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur, hingga kini masih teka-teki dan terus diselidiki. Menurut keterangan sejumlah mekanik penambang-an PT Tiga Musim Masa Jaya

(TMMJ), perusahaan subkontrak penambangan, semburan (*blow out*) lumpur diawali 27 Mei sekitar pukul 07.00. Saat itu lumpur buatan untuk melindungi mata bor sekaligus untuk memudahkan proses pengeboran (*oil base mud*) hilang atau *loss*.

Keesokan harinya, dilakukan *injeksi oil base mud*, namun bor yang ditarik ke atas macet (*stuck*) pada kedalaman 4.241 kaki. Pada 29 Mei, sekitar pukul 02.00, Free Pipe Indicator mencatat hidrogen sulfida (H_2S) 3,5 ppm menyembur ke permukaan. "Sekitar pukul 05.00, lumpur dan gas akhirnya menyembur sekitar 100 meter dari sumur," kata seorang mekanik.

Berulang kali, baik Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) maupun Lapindo Brantas Inc menyatakan, segala sesuatu telah berjalan sesuai prosedur. Termasuk salah satunya soal pemasangan selubung atau *casing*.

Pada sumur Banjar Panji 1, *casing* terakhir dipasang pada kedalaman 3.850 kaki. Sekadar catatan, kedalaman terakhir sumur adalah 9.297 kaki. Artinya, dinding sumur tak ber-*casing* sepanjang 5.447 kaki.

Penasihat Tim Penghentian Lumpur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Rudy Rubiandini menyatakan, pemasangan *casing* tidak berlaku mutlak dalam penambangan. "Dalam kasus Lapindo Brantas, tidak dipasangnya *casing* prosedural karena lapisan tanah stabil," ujarnya.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, PT Medco Energy (pemegang 32 persen saham), pada 18 Mei sempat mereko-

mendasikan agar Lapindo Brantas Inc memasang *casing* pada kedalaman 8.500 kaki. Alasan yang disebutkan dalam suratnya, hal itu bertujuan untuk menghindari potensi persoalan di dalam sumur (*potential down hole problems*). Artinya, Medco Energy telah melihat potensi persoalan apabila tidak dipasang *casing*.

Kedua, menurut sejumlah pakar, antara lain geolog dari Universitas 17 Agustus Surabaya Soffian Hadi, wilayah Porong termasuk daerah patahan aktif. Hal ini berarti formasi tanah memiliki tekanan abnormal. "Oleh sebab itu, kegiatan penambangan perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati. Salah satunya pertimbangan pemasangan *casing*," kata Hadi.

Casing pada hakikatnya adalah salah satu alat pengamanan sumur. BM Migas menyatakan *casing* bukanlah persoalan utama dalam persoalan di bumi Porong itu. Meskipun demikian, *casing* yang berupa selubung besi tersebut minimal bisa menjaga *blow out* di dalam sumur sehingga persoalan lebih bisa dikendalikan dibandingkan ketika semburan terjadi di luar sumur.

Kemungkinan ambles

Selama ini, baik BP Migas maupun Lapindo Brantas, juga selalu menghindar bila ditanya selalu menghindar bila ditanya luas hamparan fluida yang menyembur. Fluida adalah zat yang bisa mengalir, seperti air, gas, minyak, dan udara. Dalam konteks ini adalah air bersuhu sangat tinggi yang menggerus lumpur (*clay*) dan akhirnya menyembur ke permukaan.

Luas hamparan fluida ini berkorelasi dengan kemungkinan amblesnya tanah ke bawah

akibat lumpur yang tergerus keluar. Sejumlah warga bahkan telah menyatakan khawatir rumahnya akan ambles akibat lapisan tanah di bawah berongga. Menurut informasi, luasan hamparan fluida tersebut diperkirakan membentang 25 x 30 kilometer membujur arah timur laut.

Demi tidak meresahkan masyarakat, General Manager PT Lapindo Brantas Imam Agustino awalnya menyatakan volume semburan lumpur hanya 5.000 meter kubik per hari. Padahal, kajian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyebutkan volumenya mencapai sekitar 50.000 meter kubik per hari.

Setelah "bernegosiasi" dengan tujuan "tidak meresahkan masyarakat", akhirnya disepakati angka yang keluar ke masyarakat, termasuk media, adalah 25.000 meter kubik per hari.

Kemungkinan terburuk, yakni dengan menggunakan skenario *relief well*, dijadwalkan semburan bisa dihentikan pada 7 Oktober. Artinya, sampai dengan saat itu diperkirakan sekitar 3,5 juta meter kubik lumpur muntah dari perut bumi.

Artinya, apabila upaya pembuatan kolam penampungan dan konsep manajemennya tidak berjalan cepat, lumpur bisa makin meluas dengan liar. Hal ini tentunya berkaitan dengan cepat atau tidaknya semburan bisa dimatikan. Satu-satunya upaya mengarahkan lumpur ke kolam adalah dengan pompa lumpur. Persoalannya, sampai hari ini, pompa sejumlah sembilan unit yang ada tidak semuanya *slurry pump* atau pompa khusus lumpur. Sampai kapan lumpur akan menyembur?

(LAKSANA AGUNG SAPUTRA)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2006

Tempo Interaktif: Online News From Indonesia
Address http://www.tempointeraktif.com

Lamban Tangani Lumpur

Pada 20 Juni lalu, hampir sebulan setelah lumpur panas menyembur di kawasan pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, barulah wakil presiden Jusuf Kalla datang ke lokasi bencana bersama manajemen perusahaan itu. Kalla meminta Lapindo menanggung seluruh kerugian.

Mereka harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pengungsi. Juga penanganan pascabencana, seperti memperbaiki jalan, sekolah, musala, dan memulihkan rumah warga seperti semula. Wapres pun meminta Lapindo bertanggung jawab atas buruh pabrik yang tidak bisa bekerja karena pabrik mereka terendam lumpur.

Pemerintah akan mengatur apa yang perlu ditanggung, sementara Lapindo yang membayar. "Apa pun keputusan pemerintah, Lapindo harus menaati," ujar Kalla.

Pemintaan pemerintah itu disanggupi Lapindo. Nirwan Bakrie, salah seorang pemilik saham PT Lapindo Brantas, saat itu juga memberikan bantuan langsung sebesar Rp 5 miliar. Warga menilai rencana uang ganti rugi sebesar Rp 300 ribu per keluarga tidak layak. "Untuk makan saja harus irit," kata Kusnaryati, pengungsi asal Desa Renokenongo, Sidoarjo. Sebagai buruh pabrik kerupuk, Kusnaryati mengaku bisa mendapatkan penghasilan Rp 150 ribu per pekan.

Hasil jajak pendapat *Tempo Interaktif* menunjukkan mayoritas responden menilai penanganan korban bencana semburan lumpur panas dan gas di Desa Renokenongo tidak memadai.

Muslim, seorang responden di Medan, menyalakan penanganan bencana lumpur panas dan gas di Sidoarjo yang sangat lamban dan ber-tele-tele. "Kita semua berorientasi proyek, sehingga untuk menjalankan misi kemanusiaan dihitung dulu nilai proyeknya. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban bencana terkatung-katung nasibnya," ujarnya.

Indikator Pekan ini
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mengkaji kemungkinan sanksi untuk PT Lapindo Brantas sehubungan dengan kasus semburan gas disertai lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Sanksi

Menurut Anda, apakah penanganan korban bencana semburan lumpur panas dan gas di Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, sudah memadai? 20-27 Juni 2006

Jawaban	Persentase	Jumlah
Tidak	94,70%	858
Ya	4,08%	37
Tidak tahu	1,21%	11
Total	100%	906

yang diberikan bisa sampai pencabutan kontrak kerja sama Lapindo di Blok Brantas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu, mengatakan akan memanggil pengelola Lapindo. "Terkait sanksi teknis, Irjen ESDM sudah diturunkan. Yang jelas, Lapindo harus bayar semua kerugian," ujarnya. Menurut dia, karena ini sumur eksplorasi, jadi tidak masuk *cost recovery*. "Kemarin kan mereka baru memberi persekot Rp 5 miliar. Nilai kerugian keseluruhan masih dihitung," katanya.

Lapindo adalah operator yang mengelola Blok Brantas. Sedangkan saham blok tersebut dimiliki bersama oleh PT Energi Mega Persada (50 persen), PT Medco Energi (32 persen), dan Santos (18 persen).

Perlukah PT Lapindo Brantas diberi sanksi atas bencana semburan lumpur panas dan gas di Sidoarjo? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

Gaji Ke-13 Dibayar Juli

JAKARTA – Gaji ke-13 bagi pegawai negeri, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun segera dibayarkan pada Juli ini. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp18 triliun dan akan dicairkan setelah adanya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh masing-masing satuan kerja (satker). Terkait rencana tersebut, kalangan DPR mengusulkan agar pegawai negeri level kepala bagian ke atas sebaiknya tidak diberikan gaji ke-13.

"Pembayaran gaji ke-13 dilakukan Juli, dan tidak bersamaan dengan pembayaran gaji induk," ujar Dirjen Perbendaharaan Depkeu Mulia P Nasution saat dihubungi SINDO, tadi malam.

Ketentuan mengenai pembayaran gaji ke-13 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13 dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. "Untuk merealisasi gaji ke-13 bulan ini (Juli), pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp18 triliun," timpalnya.

Waktu pembayaran gaji ke-13 bisa dilakukan kapan saja, tergantung pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh masing-masing satker. Menurut Mulia, pembayarannya tidak dilakukan bersamaan dengan gaji induk pada awal Juli, karena satker baru saja menyesuaikan tunjangan umum yang harus dibayar pada gaji induk bulan Juli. "Khusus untuk pensiunan, pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada tanggal 15 Juli nanti," ungkapnya.

Sementara itu, publikasi resmi Ditjen Anggaran Depkeu mengungkapkan bahwa nilai nominal gaji ke-13 sama dengan

besarnya penghasilan sebulan yang diterima pada Juli 2006. Penghasilan dimaksud meliputi besaran gaji pokok/pensiun pokok/tunjangan, ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan umum/tambahan penghasilan pada Juli 2006, sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan. "Gaji ke-13 sengaja dibayarkan pada bulan Juli 2006 karena bertepatan dengan tahun ajaran baru bagi anak sekolah," demikian tertulis dalam publikasi tersebut.

Penerima gaji ke-13 meliputi empat golongan. *Pertama*, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, kecuali yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah. *Kedua*, pejabat negara. *Ketiga*, penerima pensiun, meliputi pensiunan PNS, pensiunan pejabat negara, penerima pensiun janda/duda/anak dari penerima pensiun, dan penerima pensiun orangtua PNS yang tewas. *Keempat*, penerima tunjangan, meliputi antara lain penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan penerima tunjangan anggota TNI/Polri.

Bambang Anom, Kepala Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), membenarkan tentang realisasi gaji ke-13 pada Juli ini. Menurut Bambang, program pemberian gaji ke-13 bagi aparatur

negara merupakan bentuk aspirasi pemerintah membantu pegawai negeri menghadapi masa sulit di Juli ini.

"Bulan Juli ini kan waktunya anak sekolah memasuki tahun ajaran baru dan lain-lain. Dengan demikian, gaji ke-13 akan sangat membantu membiayai keluarga atau anak cucu melanjutkan pendidikan," ungkapnya kepada SINDO, kemarin.

Senada dengan Mulia, Bambang menjelaskan, realisasi gaji ke-13 akan bergantung pada kesiapan masing-masing instansi. "Yang jelas, diberikan pada bulan Juli dan tanggal pemberiannya kemungkinan berbeda antara satu instansi dengan instansi lain," timpalnya.

Kabid Penum Mabes Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko mengatakan, Polri sampai kemarin belum

mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke Depkeu sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gaji ke-13. Namun, akan segera dilakukan jika memang sudah ada keterangan resmi mengenai pengadaaan gaji ke-13 tersebut.

Terkait rencana pencairan gaji ke-13 pada Juli, anggota Komisi II (Pemerintahan) DPR Jazuli Juwaini menyatakan setuju karena kebijakan tersebut dinilai tidak akan membebani APBN. Hanya dia sesali, mengapa pemberian gaji ke-13 diberikan saat banyak rakyat Indonesia membutuhkan bantuan akibat dilanda bencana.

"Bukan tidak setuju, tapi saya pertanyakan momennya. Mengapa tidak diberikan pada akhir tahun?" selidik Jazuli.

Dia mengatakan, gaji ke-13 bukan merupakan kewajiban negara kepada pegawai negeri, tetapi merupakan *political will* pemerintah. "Jadi, waktu pencairannya tergantung pada pemerintah sendiri."

Anggota FPKS ini mengusulkan, pejabat setingkat kepala bagian ke atas, termasuk pejabat negara, tidak perlu diberikan gaji ke-13. Jatah mereka, kata dia, sebaiknya disalurkan untuk membantu korban-korban bencana alam di berbagai daerah.

Namun, gaji ke-13 tetap diberikan pada pegawai negeri di level bawah. Dia juga mengingatkan, gaji ke-13 merupakan dana milik negara. "Jangan sampai dijadikan sebagai komoditas politik!" tegasnya. (masirom/hermanto/muhammad iqbal)

63.